

**ANALISIS BANTUAN MODAL PROGRAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI KERAKYATAN TERHADAP PENDAPATAN
PENGENDARA BECAK MOTOR DI KOTA PANGKAJENE
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

*An Analysis on Capital Aid of Populist Economic Empowerment Program
for Motor Becak Drivers' Income in Pangkajene City
of Sidenreng Rappang Regency*

ARIEF GUNAWAN SUKARDIN



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

**ANALISIS BANTUAN MODAL PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
KERAKYATAN TERHADAP PENDAPATAN PENGENDARA
BECAK MOTOR DI KOTA PANGKAJENE
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

*An Analysis on Capital Aid of Populist Economic Empowerment Program
for Motor Becak Drivers' Income in Pangkajene City
of Sidenreng Rappang Regency*

T E S I S

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

**Pada Program Studi
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Konsentrasi Perencanaan Kependudukan dan SDM**

**Disusun dan Diajukan Oleh
ARIEF GUNAWAN SUKARDIN**

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

TESIS

ANALISIS BANTUAN MODAL PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN TERHADAP PENDAPATAN PENGENDARA BECAK MOTOR DI KOTA PANGKAJENE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Disusun dan diajukan oleh

ARIEF GUNAWAN SUKARDIN
P0306205208

Telah dipertahankan di depan panitia ujian tesis
pada tanggal 26 Mei 2007
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasehat

Prof. Dr. Sulaiman Asang, MS

Ketua

Ketua Program Studi
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dr. Paulus Uppun, MA

Anggota

Ketua Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin

Dr. Ir. Didi Rukmana, MS

Prof. Dr. dr. A. Razak Thaha, MSc

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : ARIEF GUNAWAN SUKARDIN

Nomor Pokok : P0306205508

Program Studi : Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH)

Konsentrasi : Perencanaan Kependudukan dan SDM

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil kerja saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini merupakan hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 30 Mei 2007

Yang membuat pernyataan

Arief Gunawan Sukardin

P R A K A T A

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas petunjuk dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dalam bentuk tesis dengan judul ***Analisis Bantuan Modal Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan terhadap Pendapatan Pengendara Bemor di Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang***. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Pengelolaan Lingkungan Hidup Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Penulisan tesis ini dapat diselesaikan berkat petunjuk dan arahan dari komisi penasehat Bapak Prof. Dr. H. Sulaiman Asang, MS sebagai ketua komisi dan Bapak Dr. Paulus Uppun, MA sebagai anggota komisi, dengan ketulusan hati dalam membimbing penulis mulai dari awal penelitian sampai selesainya tesis ini.

Ucapan terima kasih kepada Ibunda Hj. Murni Kuruseng dan Ayahanda Drs.H.Sukardin BM yang tak henti-hentinya mendoakan anakda semoga menjadi anak yang berguna serta saudara-saudaraku yang tercinta. Kepada Keluarga Bapak Ir. H. Abu Laddong, MS yang telah memberikan semangat dalam menjalani perkuliahan.

Teristimewa buat istriku tercinta Husniwati, SE serta anak-anakku tersayang Muhammad Rafli Hidayatullah dan Muhammad Akbar Alhafidz yang menjadi inspirasi dalam kehidupan penulis dengan segala kesabaran dan perhatian yang tulus serta senantiasa memberikan dorongan dan semangat selama kuliah hingga selesainya tesis ini.

Pada kesempatan yang berbahagia ini penulis haturkan terima kasih dan penghargaan kepada kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin dan Direktur Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Dr. Ir. Didi Rukmana, MS Ketua Program Studi Pengelolaan Lingkungan Hidup Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. H. Tahir Kasnawi, SU selaku Ketua Konsentrasi Perencanaan Kependudukan dan SDM.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sampai menyelesaikan studi pada Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Konsentrasi Perencanaan Kependudukan dan SDM.
5. Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati Sidenreng Rappang atas Kesempatan dan peluang yang diberikan sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan pada Program Pascasarjana.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Sidenreng Rappang atas segala bantuan yang diberikan selama masa studi pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

7. Rekan-rekan Mahasiswa Program Perencanaan Kependudukan dan SDM angkatan V serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu mulai dari awal sampai selesainya tesis ini.

Dengan segala kemampuan yang dimiliki, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan isi tesis ini, namun karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa sehingga masih terdapat kekurangan. Kiranya penulisan tesis ini dapat berguna bagi pembaca, terutama bagi penulis. Semoga apa telah dilakukan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. *Amin ya rabbal'alam.*

Makassar, 30 Mei 2007.

Arief Gunawan Sukardin

ABSTRAK

ARIEF GUNAWAN SUKARDIN. *Analisis Bantuan Modal Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Terhadap Pendapatan Pengendara Becak Motor di Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang.* (dibimbing oleh Sulaiman Asang dan Paulus Uppun).

Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui hubungan bantuan modal program pemberdayaan ekonomi kerakyatan terhadap pendapatan dan (2) mengetahui hubungan faktor umur, pendidikan, jam kerja, jumlah tanggungan, pengalaman kerja, dan status kepemilikan dengan pendapatan pengendara bemor.

Lokasi penelitian di Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang. Populasi penelitian adalah semua pengendara bemor yang beroperasi di Kota Pangkajene berjumlah 350 yang terdiri atas kelompok penerima bantuan dan nonpenerima bantuan. Sampel diambil secara *probability sampling* dengan cara *simple random sampling* sebanyak 100 orang. Data dianalisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif kuantitatif dengan menggunakan tabel frekuensi dan tabel silang. Untuk menguji hipotesis digunakan analisis *chi square* dan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel digunakan indeks keeratan hubungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pendapatan antara kelompok penerima bantuan dengan kelompok nonpenerima bantuan. Faktor umur, pendidikan, jam kerja, jumlah tanggungan dan pengalaman kerja mempunyai hubungan signifikan, dan status kepemilikan memberikan perbedaan terhadap pendapatan pengendara bemor di Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kata Kunci : Bantuan Modal, Produktivitas, dan Pendapatan.

ABSTRACT

ARIEF GUNAWAN SUKARDIN. *An Analysis on Capital Aid of Populist Economic Empowerment Program for Motor Becak Drivers' Income in Pangkajene City of Sidenreng Rappang Regency (supervised by Sulaiman Asang and Paulus Uppun)*

This research aimed to find out the correlation between capital aid of populist economic empowerment program and the income of motor becak drivers in Pangkajene City of Sidenreng Rappang Regency; and to find out the correlation between age, education, work hours, number of dependents, work experience, and ownership status and the income of motor becak drivers.

This research was carried out in Sidenreng Rappang Regency. The population consisted 350 motor becak drivers in Pangkajene City of Sidenreng Rappang Regency. The sample consisted of 100 respondents who were aid receivers and non aid receivers. It was selected using probability sampling by means of simple random sampling method. The data were analyzed using quantitative descriptive statistics by means of frequency table and cross table while the hypothesis was tested using chi square analysis.

The results show that there is no difference between the income of aid receiver group and that of non aid receiver group. Age, education, work hour, number of dependents, and work experience have a significant correlation. Meanwhile, ownership status indicates any differences of income among motor becak drivers in Pangkajene City of Sidenreng Rappang Regency.

Key words : Capital aid, productivity, and income.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Makna Pemberdayaan	8
B. Ekonomi Kerakyatan	12
C. Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan	14
D. Usaha Kecil	20
E. Kemiskinan	22
F. Becak Motor	24
G. Pendapatan	25
H. Kerangka Pemikiran	27
I. Skema Kerangka Pemikiran	33
J. Hipotesis	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
B. Jenis Penelitian	35
C. Populasi dan sampel	35
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Pengumpulan Data	37
F. Analisa Data	38
G. Definisi Operasional	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Daerah Penelitian	43
B. Karakteristik Responden	54
C. Hubungan Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan terhadap Pendapatan Pengendara Becak Motor	68
D. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pendapatan Pengendara Becak Motor	75

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	94
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Hal
1.	Luas Wilayah Kabupaten Sidrap menurut Kecamatan dan Persentase Luas dari Luas Kabupaten, tahun 2004.	44
2.	Penduduk Kabupaten Sidrap Menurut Kecamatan dan Rasio Jenis Kelamin, Tahun 2005.	46
3.	Penduduk Kota Pangkajene Menurut Kelurahan dan Rasio Jenis Kelamin, Tahun 2007.	47
4.	Penduduk Kabupaten Sidrap Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2005.	47
5.	Penduduk Umur 10 tahun ke Atas menurut Jenjang Pendidikan SD, SLTP, dan SLTA yang Ditamatkan di Kabupaten Sidrap, Tahun 2005.	49
6.	Jumlah Desa/Kelurahan, Rumah Tangga, Kepadatan Penduduk, dan Anggota Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidrap, Tahun 2005.	50
7.	Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Jumlah Jam Kerja Di Kabupaten Sidrap, Tahun 2005.	51
8.	Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Sidrap, Tahun 2005.	52
9.	PDRB per kapita Penduduk Kabupaten Sidrap Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2000 – 2004.	53
10.	Distribusi Responden Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Sidrap, Tahun 2007.	55
11.	Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sidrap, Tahun 2007.	58
12.	Distribusi Responden Menurut Jumlah Jam Kerja di Kabupaten Sidrap, Tahun 2007.	59

Nomor	Teks	Hal
13.	Distribusi Responden Menurut Jumlah Tanggungan di Kabupaten Sidrap, Tahun 2007.	61
14.	Distribusi Responden Menurut Pengalaman Kerja di Kabupaten Sidrap, Tahun 2007.	63
15.	Distribusi Responden Menurut Status Kepemilikan Bemor di Kabupaten Sidrap, Tahun 2007.	64
16.	Distribusi Responden Menurut Jumlah Pendapatan di Kabupaten Sidrap, Tahun 2007.	66
17.	Distribusi Pengendara Bemor menurut Jumlah Pendapatan dan Kelompok di Kabupaten Sidrap, 2007.	69
18.	Status Penerima Bantuan Modal Program PEK terhadap Pendapatan Pengendara Bemor di Kabupaten Sidrap, Tahun 2007.	70
19.	Pendapatan Pengendara Bemor menurut Status Penerima Bantuan PEK dan Jam Kerja di Kabupaten Sidrap, 2007.	71
20.	Distribusi Pengendara Bemor menurut Pendapatan dan Kelompok Umur di Kabupaten Sidrap, Tahun 2007.	76
21.	Distribusi Pengendara Bemor menurut Pendapatan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sidrap, Tahun 2007.	79
22.	Distribusi Pengendara Bemor menurut Pendapatan dan Jumlah Jam Kerja di Kabupaten Sidrap, Tahun 2007.	83
23.	Distribusi Pengendara Bemor menurut Pendapatan dan Jumlah Tanggungan di Kabupaten Sidrap, Tahun 2007.	85
24.	Distribusi Pengendara Bemor menurut Pendapatan dan Pengalaman Kerja di Kabupaten Sidrap, Tahun 2007.	87
25.	Distribusi Pengendara Bemor menurut Pendapatan dan Status Kepemilikan di Kabupaten Sidrap, Tahun 2007.	90
26.	Hasil Perhitungan <i>Chi-Square</i> , Koefisien Kontigensi minimal (<i>C min</i>), Indeks Kuat Hubungan (IKH), dan Hubungan antara Variabel.	92

DAFTAR LAMPIRAN

1. Quisioner Penelitian	100
2. Rekapitulasi Hasil Quisioner	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat merupakan sasaran utama dari segala kebijakan pembangunan karena tingkat kesejahteraan sebuah keluarga menjadi indikator kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan dari suatu program pembangunan.

Merupakan suatu tantangan dalam rangka mengurangi keluarga miskin di pedesaan, walaupun terjadi pertumbuhan ekonomi dan tercapainya hasil pembangunan yang berorientasi pada pemerataan, namun kenyataan di Indonesia pada tahun 2004 masih ditemui banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Dalam tahun 2007 masih akan tetap terjadi kesenjangan antara kelompok yang kaya dengan masyarakat miskin.

Sudah sepatutnya kita merenungkan kondisi kemiskinan ini, sebab siapapun orangnya dan bagaimanapun tata kehidupannya, serta apapun perbuatannya, asalkan mereka tergolong dalam kategori warga Negara Indonesia, tentu akan sepakat bahwa yang paling dibutuhkan adalah kondisi kemakmuran dan meninggalkan kemiskinan (Sasmita, 1995).

Wacana tentang penanggulangan kemiskinan menjadi bahan publikasi dari berbagai media, tidak hanya semakin bertambahnya keluarga

miskin di Indonesia, yang disebabkan oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dilain pihak bantuan pemerintah yang makin bertambah dengan tujuan membantu keluarga miskin. Wacana tersebut, bukan merupakan tindakan yang tepat untuk mengurangi kemiskinan, melainkan akan lebih meningkatkan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah.

Untuk menanggulangi kemiskinan perlu adanya upaya pemerintah untuk menyediakan kesempatan kerja yang dapat menyerap angkatan kerja yang termasuk kedalam sektor informal. Cara demikian akan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat miskin terhadap bantuan-bantuan pemerintah yang sifatnya jangka pendek (Tjokroamidjojo, 1997).

Dalam upaya menanggulangi dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan, memang diperlukan bantuan yang sifatnya sementara khususnya dalam menanggulangi keterbatasan pangan, dan titik puncak idealisme pembangunan yang paling dibutuhkan masyarakat adalah peluang dan kepastian, yakni dalam hal memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya bersama keluarga (Raharjo, 1997).

Dari sekitar 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdapat sekitar 40 juta jiwa tergolong dalam masyarakat miskin dan 80 % diantaranya bukan membutuhkan bantuan makanan dari pemerintah, akan tetapi memerlukan peluang dan kepastian karena mereka mampu berusaha sendiri. Jadi yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin bukan ketergantungan kepada pemerintah dalam hal bantuan modal, akan tetapi kesempatan kerja yang

menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi kebutuhan hidup bersama keluarganya (Tirtosudiro, 1999).

Sebenarnya sudah banyak kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka pembangunan ekonomi, termasuk pengembangan sektor usaha rumah tangga yang banyak menyerap tenaga kerja yang berasal dari keluarga kurang mampu dan perlu terus dikembangkan dalam sistem perekonomian Indonesia (Sasono, 1998).

Penanggulangan keluarga miskin dengan jalan mengembangkan sektor usaha kecil merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang paling tepat, dibandingkan dengan memberikan bantuan berupa pangan (raskin) yang murah, Subsidi Bahan bakar Minyak (Subsidi BBM), Pengobatan gratis, dan bantuan tunai langsung (BLT) yang dilakukan disemua desa dan kelurahan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Bantuan semacam ini hanya akan meningkatkan ketergantungan dan memanjakan masyarakat miskin, karena selalu ingin menerima bantuan tanpa mau berusaha, jadi bukan membina masyarakat untuk bekerja lebih produktif.

Sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pada penerapan sistem ekonomi kerakyatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang melalui PERDA Nomor 13 Tahun 2002 tentang Rencana Strategi Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2001 – 2005 telah menetapkan pengembangan ekonomi rakyat sebagai salah satu kebijakan pembangunan ekonomi (Anonim, 2004).

Kebijakan ini dilaksanakan dalam bentuk suatu program yang diatur oleh Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yakni suatu model pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pemberian bantuan dana sebagai modal kerja bagi usaha kecil yang disalurkan oleh satuan kerja (Dinas/Kantor) dalam bentuk pinjaman dana bergulir (Anonim, 2006a).

Untuk lebih memajukan usaha kecil dengan memadukan program pembangunan keluarga sejahtera, tidak hanya membina masyarakat untuk dapat meningkatkan produktifitasnya tetapi mengajak masyarakat untuk dapat menjadi pengusaha kecil, dengan adanya kebijakan pemerintah dalam pemberian bantuan permodalan melalui program pemberdayaan ekonomi kerakyatan bagi usaha kecil.

Upaya pengembangan usaha kecil di Kabupaten Sidenreng Rappang telah dialokasikan dana bantuan melalui program pemberdayaan ekonomi kerakyatan untuk usaha kecil dengan alokasi dana APBD tahun 2002 sebesar Rp. 565.000.000,- untuk 374 orang pengusaha kecil, tahun 2003 sebesar Rp. 600.000.000,- untuk 417 orang pengusaha kecil dan tahun 2004 sebesar Rp. 1.100.000.000,- untuk 703 orang pengusaha kecil. Khusus untuk bantuan bagi pengendara bemor dialokasikan pada tahun 2004 sebesar Rp. 211.000.000,- untuk 211 orang pengendara bemor yang resmi terdaftar pada Dinas Perhubungan (Anonim, 2004). Jika hal ini terus dikembangkan secara berkesinambungan, maka akan dapat memperlancar

kegiatan ekonomi, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin.

Usaha kecil yang paling banyak ditekuni di Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain pedagang campuran, industri meubel, jual bahan bangunan, pedagang buah-buahan, service elektronik, industri makanan ringan, pedagang telur, foto studio, penjual rotan, perbengkelan, pedagang tekstil, wartel, pertukangan, toko obat, pedagang kosmetik/salon, tukang emas, pedagang emas, tukang jahit, percetakan/foto copy dan pengendara becak motor.

Salah satu usaha kecil yang menjadi prioritas bantuan program ekonomi kerakyatan adalah pengendara becak. Hal ini disebabkan karena usaha becak ini merupakan usaha yang banyak digeluti oleh keluarga miskin khususnya yang berdomisili di Kota Pangkajene Kecamatan MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pengembangan usaha ekonomi produktif sektor angkutan dan informal seperti pengendara becak dengan bantuan permodalan dari pemerintah berupa bantuan dengan bunga ringan tanpa agunan akan membantu keluarga miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk meningkatkan kegiatan usaha ekonominya. Raharjo (1999), mengemukakan pemberian bantuan permodalan tanpa agunan, maupun dengan kredit bunga ringan akan memberikan peluang dan partisipasi angkatan kerja bagi masyarakat ekonomi lemah di daerah pedesaan maupun perkotaan.

Persoalannya apakah bantuan modal program pemberdayaan ekonomi kerakyatan mempunyai hubungan terhadap pendapatan dan kesejahteraan pengusaha kecil khususnya pengendara bemor. Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya pemikiran untuk melakukan penelitian mengenai analisis bantuan modal program pemberdayaan ekonomi kerakyatan terhadap pendapatan pengendara bemor di Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan bantuan modal program pemberdayaan ekonomi kerakyatan terhadap pendapatan pengendara bemor di Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Apakah faktor umur, pendidikan, Jam kerja, jumlah tanggungan, pengalaman kerja, dan status kepemilikan mempunyai hubungan dengan pendapatan pengendara bemor di Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hubungan bantuan modal program pemberdayaan ekonomi kerakyatan terhadap pendapatan pengendara bemor di Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Untuk mengetahui hubungan faktor umur, pendidikan, Jam kerja, jumlah tanggungan, pengalaman kerja, dan status kepemilikan dengan pendapatan pengendara bemor di Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk :

1. Bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka penyempurnaan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
2. Mengoptimalkan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan untuk mendukung pengembangan usaha angkutan bemor sehingga dapat meningkatkan pendapatan pengendara bemor.
3. Bahan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pihak-pihak yang membutuhkan untuk mengetahui lebih lanjut tentang peranan usaha angkutan bemor dalam menciptakan lapangan kerja bagi keluarga miskin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Makna Pemberdayaan

Empowerment yang dalam bahasa Indonesia berarti pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat utamanya Eropa. Makna pemberdayaan menurut Pranaka dan Moejarto dalam Prijono (1999), dapat diklasifikasikan dalam kecenderungan primer atau sekunder. Kecenderungan pertama menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung perkembangan kemandirian mereka melalui organisasi. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Kecenderungan kedua ini dalam proses pengembangan idenya banyak dipengaruhi oleh karya Paula Freire dalam Prijono (1999), tentang konsistensi yang mengandung muatan pemikiran mengenai pemikiran kemampuan individu untuk mengontrol lingkungannya. Menurutnya kesadaran kritis dalam diri seseorang dapat dicapai dengan cara melihat ke

dalam diri sendiri serta menggunakan apa yang didengar, dilihat dan dialami untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Dalam hal ini seseorang menganalisa sendiri masalah mereka mengidentifikasi sebab-sebabnya, menetapkan prioritas dan memperoleh pengetahuan baru. Konsistensi merupakan sesuatu yang terjadi pada diri seseorang, yang tidak dipaksakan dari luar. Analisis realitas harus dilakukan oleh orang yang dapat memutuskan sendiri apa kebutuhan dan pengalaman yang penting baginya dan bukan diputuskan oleh orang lain. Makna pemberdayaan tersebut diatas bukanlah merupakan klasifikasi yang kaku. Antar keduanya bisa saling terkait. Agar kecenderungan primer terwujud, seringkali harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu.

Ketidakterdayaan bukan menunjuk pada tidak adanya kekuatan sama sekali. Dalam realita, mereka yang tampaknya hanya memiliki sedikit kekuatan ternyata justru mampu untuk bertahan, menggulingkan, dan kadang-kadang mentransformasikan kondisi hidup mereka. Jadi kekuatan itu ada hanya saja perlu untuk ditampakkan (Kabeer dalam Priyono, 1999). Argumentasi ini didasarkan pada pandangan Talcoot Parson dalam Priyono (1999), yang membedakan kekuasaan (*power*) menjadi dua dimensi yaitu distributif dan generatif. Dimensi distributif kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain, sedangkan dimensi generatif kekuasaan merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkan masyarakat atau unit sosial untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masa depan mereka

yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri. Dalam hal ini, Kabeer dalam Priyono (1999), mengarahkan pada dimensi generatif kekuasaan yang dapat diciptakan melalui organisasi sosial dalam kelompok kaum marjinal untuk mendorong proses perubahan sosial yang memungkinkan mereka untuk memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap lingkup kehidupan mereka pada tingkat lokal maupun nasional.

Konsep pemberdayaan juga di kemukakan oleh Bookman dan Morgan dalam Priyono (1999), mengemukakan pemberdayaan sebagai konsep yang sedang populer mengacu pada usaha menumbuhkan keinginan pada seseorang untuk mengaktualisasikan diri, melakukan mobilitas keatas, serta memberikan pengalaman psikologis yang membuat seseorang merasa berdaya. Lebih lanjut dikemukakan bahwa keinginan untuk mengubah keadaan yang datang dari dalam diri tersebut dapat muncul jika seseorang merasa dalam situasi tertekan dan kemudian menyadari atau mengetahui sumber tekanan tersebut.

Sementara itu menurut Kartasasmita (1996), mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai ketahanan nasional. Memberdayakan masyarakat

berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Lebih lanjut Kartasmita (1996), mengemukakan upaya memberdayakan masyarakat haruslah pertama-tama dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya upaya itu harus diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana.

Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta membuka akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya. Demikian pula pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasian ke dalam

kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya (Kartasasmita, 1999).

B. Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Sistem ekonomi kerakyatan mencakup administrasi pembangunan nasional mulai dari sistem perencanaan hingga pemantauan dan pelaporan. Sesungguhnya ekonomi kerakyatan adalah demokrasi ekonomi. Di Indonesia, demokrasi ekonomi dikembangkan berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila.

Demokrasi ekonomi Pancasila, yang juga merupakan sistem ekonomi kerakyatan, memiliki semangat musyawarah mufakat dan gotong royong, serta mengacu pada lima prinsip, yaitu (1) prinsip visi, misi, dan strategi pembangunan yang memihak kepada rakyat, yang diwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan pembangunan. (2) Prinsip pedoman pembangunan dengan azas musyawarah dan mufakat yang diwujudkan dalam bentuk dokumen pembangunan yang benar. (3) Prinsip keterpaduan mekanisme pembangunan dengan azas keseimbangan antara kepentingan masyarakat lokal dan kepentingan nasional. (4) Prinsip koordinasi pembangunan dengan azas kebersamaan antar unsur yang terlibat dalam pembangunan secara lintas sektor. (5) Prinsip pelestarian pembangunan yang diselenggarakan melalui proses pembiayaan pembangunan, pemantauan, dan evaluasi yang dilakukan oleh rakyat (Sumodiningrat, 1999).

Menurut Mubyarto (1997), ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya yang ada yang dapat dikelolanya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhannya. Keterkaitan lebih rinci dijelaskan bahwa ekonomi rakyat dilakukan oleh masyarakat tanpa modal besar dan dengan cara-cara swadaya. Dalam usaha ekonomi rakyat tidak ada buruh, tidak ada majikan, dan tidak mengejar untung tetapi dilakukan hanya sekadar bertahan hidup.

Karena kemampuan masyarakat tidak sama dan tidak merata, maka pemerintah berperan penting dalam menciptakan iklim kondusif sehingga setiap pelaku ekonomi akan mempunyai kemampuan sama dalam menghasilkan dan menikmati hasil pembangunan. Melalui rangkaian prinsip di atas, sistem ekonomi kerakyatan diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat dapat terwujud apabila pembangunan mengarah ke perubahan struktur masyarakat. Proses perubahan struktur diawali dari proses peningkatan produksi dan distribusi yang selanjutnya dapat membuka kesempatan kerja. Kesempatan kerja menciptakan peningkatan pendapatan serta kesempatan untuk meningkatkan tabungan yang digunakan untuk pembentukan modal bagi perubahan teknologi. Perubahan teknologi ini, akhirnya akan kembali menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Proses ini harus berjalan secara berkesinambungan sehingga kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan terwujud (Sumodiningrat, 1999).

Kartasasmita (1996), mengemukakan bahwa ekonomi kerakyatan dapat dikenal dari ciri-ciri pokoknya yang bersifat tradisional, skala usaha kecil, dan kegiatan usaha ekonomi hanya sekadar untuk bertahan hidup. Selanjutnya ekonomi kerakyatan diartikan sebagai ekonomi usaha kecil, masih lemah dan kurang tangguh untuk menghadapi dan memperoleh manfaat dari ekonomi terbuka.

C. Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

1. Pengertian

Program pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi rakyat yang dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan dana pinjaman sebagai modal kerja bagi usaha kecil (Anonim, 2004).

2. Tujuan

Adapun tujuan program sebagai berikut :

- a. Menciptakan peluang usaha dan memperluas lapangan kerja.
- b. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan permodalan.
- c. Menghidupkan dan merangsang kegiatan produksi yang berbasis pada ekonomi rakyat.
- d. Meningkatkan pertumbuhan dan menggerakkan roda ekonomi (Anonim, 2004).

3. Sasaran

Tersalurnya bantuan pada masyarakat ekonomi lemah yang terdiri dari : petani, nelayan, peternak, pengrajin industri kecil, industri rumah tangga, pedagang kaki lima, dan kegiatan jasa lainnya (Anonim, 2004).

4. Mekanisme Pengelolaan

a. Prinsip – prinsip pengelolaan

Menurut Kartasasmita (1996), bahwa bantuan dana yang disalurkan pada masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi kerakyatan harus dikelola secara tertib dan tranparan dengan mengacu pada lima prinsip umum pengelolaan : Pertama, Mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat sebagai pelaksana dan pengelola (*acceptable*), Kedua, Dapat dikelola masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*), Ketiga, Memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (*profitable*), Keempat, Hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri sehingga menciptakan pemupukan modal (*sustainable*), Kelima, Pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas (*replicable*).

Disamping prinsip-prinsip umum tersebut diatas, pengelolaan dana juga mengacu pada hal-hal khusus sebagai berikut :

1. Dianggarkan dalam APBD.
2. Digunakan untuk bantuan modal kerja bagi usaha kecil.
3. Direncanakan dari bawah (*botton up*) dengan menggunakan pendekatan partisipatif.
4. Disalurkan melalui satuan kerja (Dinas/Kantor) dalam bentuk pinjaman.
5. Memberikan peluang usaha bagi masyarakat ekonomi lemah.

b. Perencanaan

Secara garis besar penyusunan rencana program dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Masyarakat melalui musyawarah pembangunan (MUSBANG) di tingkat Desa/Kelurahan mengusulkan jenis kegiatan usaha yang akan dilakukan.
2. Usulan tersebut kemudian dilanjutkan pada diskusi UDKP tingkat kecamatan untuk menyusun usulan rencana program yang akan diakomodir oleh Dinas/Kantor sesuai bidang tugasnya.
3. Kemudian dituangkan dalam Rancangan Repetada yang dibahas dalam RAKORBANG sebagai bahan RAPBD dan selanjutnya dianggarkan dalam APBD.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan program mengacu pada buku petunjuk Pengelolaan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dengan penegasan sebagai berikut :

1. Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang selaku mediator kegiatan program melakukan dengan instansi terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan program.
2. Pembentukan kelompok kerja (POKJA) tingkat Kabupaten dengan melibatkan instansi terkait, Pokja ini bertugas : (1) menyeleksi dan menetapkan satu orang fasilitator yang juga bertindak sebagai kolektor mewakili Dinas/Kantor di tiap-tiap kecamatan, (2) mengidentifikasi jenis-jenis usaha ekonomi kerakyatan yang sesuai dan layak untuk dikembangkan, (3) menyeleksi dan menilai permohonan yang diajukan oleh masyarakat meliputi pemeriksaan, administrasi, dan rencana penggunaan anggaran, (4) memilih dan menetapkan jenis usaha dan penerima dana pinjaman dituangkan dalam Keputusan Bupati, (5) membuat naskah perjanjian antara pelaku usaha ekonomi dengan bank pelaksana yang ditunjuk.
3. Penyaluran dan pencairan dana
Mekanisme penyaluran dan pencairan dana diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 633 Tahun 2002 tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Pinjaman Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan pada masing-masing Unit Kerja Pengelola dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
Untuk lebih jelasnya prosedur pengajuan usulan sebagai berikut :
Masyarakat mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan modal sesuai dengan bidang usaha yang diinginkan,

kemudian usulan tersebut diajukan kepada Desa/Kelurahan dan Camat untuk diketahui, selanjutnya diajukan pada unit kerja untuk mendapatkan persetujuan. Seluruh dokumen usulan tersebut diserahkan pada Tim Pokja untuk diperiksa kelengkapan dan kelayakannya.

Untuk mekanisme pencairan dana dilakukan setelah usulan tersebut disetujui oleh Tim Pokja, untuk kemudian diteruskan ke Bank guna pencairan dana. Dana yang dicairkan dapat langsung diterima melalui rekening yang telah dibuka sebelumnya oleh pemohon (masyarakat) dengan jumlah bantuan maksimal Rp. 5.000.000,- dan minimal Rp. 250.000,-

4. Pengembalian Dana

Setiap masyarakat yang telah mendapatkan bantuan dana diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, tidak termasuk tenggang waktu tiga bulan terhitung mulai tanggal penyaluran.

Besarnya pengembalian dana pinjaman adalah jumlah pokok ditambah bunga sebesar 6 persen pertahun atau 0,5 persen per bulan adapun untuk besarnya angsuran didasarkan pada surat pernyataan pengembalian yang telah disepakati sebelumnya.

Pengembalian dana dari masyarakat disetor kepada pembantu kolektor dan atau kolektor yang telah ditunjuk melalui Keputusan Bupati, kemudian kolektor menyetornya ke Kas Daerah.

Bagi masyarakat yang pengembalian dananya terlambat dikenakan denda sebesar 0,5 persen perbulan dari sisa tunggakan (Anonim, 2004).

d. Pelaporan

Untuk mengetahui sejauh mana kinerja pelaksanaan program dibutuhkan adanya sistem pelaporan yang cepat dan tepat, oleh karena itu paling lambat 10 bulan berikutnya (setelah pencairan dana) dibuat laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Bupati Sidenreng Rappang Cq. Bagian Keuangan dan tembusan kepada Tim Pemantau. Adapun untuk laporan penerimaan pengembalian dana pinjaman dibuat untuk setiap bulannya dan disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Keuangan dan tembusan kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Tim Pemantau (Anonim, 2004).

e. Pembinaan

Pembinaan merupakan bagian penting yang turut menentukan keberhasilan suatu program, dan tujuan dari pembinaan itu sendiri adalah :

1. Terlaksananya mekanisme pengelolaan secara lancar sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
2. Mengarahkan pemanfaatan dana pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai (Anonim, 2004).

D. Usaha Kecil

Usaha merupakan suatu aktifitas untuk mendatangkan hasil yang diinginkan, baik ditinjau dari sudut ekonomi maupun sosial, hal itu tergantung kepada orang yang melakukan usaha. Tjokroamidjojo (1997), mengemukakan usaha kecil adalah usaha ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan permodalan yang relatif kecil bersumber dari modal sendiri atau pinjaman, menggunakan tenaga kerja keluarga, dan umumnya dilakukan dalam lingkungan rumah tangga/keluarga.

Mubyarto (1997), mengemukakan bahwa usaha kecil adalah suatu kegiatan yang berorientasi ekonomi kerakyatan dengan permodalan yang relatif kecil dengan skala keluarga atau dilakukan dalam lingkungan keluarga. Usaha ini hanya memerlukan investasi yang kecil dan tenaga kerja yang kecil pula. Sehingga surplus yang dihasilkan lebih hanya untuk mempertahankan permodalan dan yang lebih penting adalah untuk kebutuhan konsumtif bagi keluarga.

Dalam dunia bisnis dikenal adanya usaha besar dan kecil sehingga Sasono (1998), berpendapat bahwa ada tiga ukuran usaha, yaitu usaha kecil, menengah, dan besar. Usaha kecil umumnya dilakukan dalam lingkungan keluarga dengan modal yang terbatas dan bahan baku lokal, tidak terdeteksi/sulit dicacah, serta umumnya tidak memiliki izin usaha dan modalnya relatif kecil, merupakan usaha keluarga dan tenaga kerja yang digunakan relatif kecil. Usaha ini mengakar dan membudaya dikalangan

masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah perlu melakukan program keberpihakan, karena merupakan potensi ekonomi yang bersifat fundamental.

Dipo Alam (1999), mengemukakan bahwa usaha kecil adalah suatu kegiatan ekonomi produktif yang berskala kecil dan dilakukan dalam lingkungan keluarga, tidak ada batasan mengenai modal yang digunakan. Usaha kecil ini dapat berbentuk perusahaan kecil jika memiliki surat izin usaha dari pemerintah.

Sukirno (1985), mengemukakan bahwa sektor informal identik dengan usaha kecil yang umumnya memanfaatkan bahan baku lokal tersedia dan dikelola secara tradisional. Jadi yang dimaksud usaha kecil dalam penelitian ini adalah usaha ekonomi produktif berupa usaha jasa pengangkutan bemor yang dapat menyerap dan memberikan peluang dan kesempatan kerja bagi keluarga miskin untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Selanjutnya Amang (1995), mengatakan bahwa usaha kecil dapat dilihat dari ciri-cirinya, baik perorangan maupun kelompok sebagai berikut :

- (1) Modal kecil, dalam hal tertentu kadang tenaga kerja saja merupakan faktor produksi yang digunakan,
- (2) Biaya produksi kecil,
- (3) Teknologi yang digunakan sederhana,
- (4) Mutu produksi yang dihasilkan rendah,
- (5) Pasar terbatas,
- (6) Usaha perluasan pasar selalu terbentur pada kendala peraturan, dan
- (7) Masalah pembiayaan yang disebabkan karena keterbatasan akses terhadap dunia perbankan.

E. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dipunyai oleh manusia yang sama tuanya dengan usia manusia itu sendiri yang implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia. Asang (2005), mengemukakan bahwa salah satu jenis kemiskinan yang banyak dipermasalahkan oleh berbagai ahli adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang diderita oleh golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut, tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia.

Parasudi (1996), mengemukakan miskin dapat didefinisikan sebagai suatu standar hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar hidup yang rendah ini secara langsung mempunyai hubungan terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Harjadi (1995), mengemukakan seseorang dapat digolongkan sebagai golongan miskin jika tidak mampu mengkonsumsi antara 900 – 1200 kalori per hari per orang, jika kurang dari itu maka ia tergolong miskin sekali. Selanjutnya Sajogyo dalam Asang (2005), mengukur kemiskinan melalui tingkat keadaan ekonomi rumah tangga, yaitu tingkat mencapai kecukupan dalam hal kebutuhan dasar manusia khususnya kebutuhan fisik berupa

pangan dan bukan pangan. Berdasarkan jenis kebutuhan minimal ini BPS menetapkan kecukupan kalori sebesar 2.100 kalori/orang/hari untuk rata-rata orang Indonesia plus satu paket kebutuhan fisik bukan pangan.

Papanek dalam Raharjo (1997), mengemukakan sebenarnya banyak tolok ukur yang dapat dijadikan pedoman bagi keluarga miskin, yakni dapat diukur menurut jumlah kalori yang dibutuhkan setiap hari, beras yang dikonsumsi, dan tingkat pendapatan seseorang. Sedangkan Faisal Basri dalam Muis (1999), mengemukakan bahwa masyarakat miskin di pedesaan dan di perkotaan berbeda, sehingga ukuran miskin merupakan ukuran relatif, namun yang pasti orang miskin itu tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan maupun sandang secara minimal.

Suparlan (1985), mengemukakan tolok ukur yang umumnya dipakai adalah berdasarkan atas tingkat pendapatan per waktu kerja, di Indonesia digunakan ukuran waktu kerja sebulan. Dengan adanya tolok ukur tersebut maka jumlah dan siapa yang tergolong sebagai keluarga miskin dapat diketahui untuk dijadikan sebagai kelompok sasaran yang ingin ditanggulangi kemiskinannya. Tolok ukur yang telah dibuat dan digunakan di Indonesia untuk menentukan besarnya jumlah orang miskin adalah batas tingkat pendapatan per waktu kerja. Berdasarkan Suspanas tahun 2000 digunakan pendapatan Rp. 300.000,- sebagai dasar pendapatan per bulan.

Sayogyo (1986), mengemukakan seseorang dapat dikatakan miskin jika saja dirinya tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan minimum. Kebutuhan pangan minimum adalah seseorang yang relatif kurang mampu

mengkonsumsi setara 320 kilogram beras per orang per tahun. Widjaja (1987), menyatakan batas minimal konsumsi seseorang digolongkan miskin adalah mereka yang makan kurang dari 320 kilogram beras di desa dan 420 kilogram beras di kota per tahun.

F. Becak Motor (*BEMOR*)

Menurut Warpani (1990), kendaraan angkutan umum penumpang adalah angkutan yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar, baik secara perorangan maupun patungan. Termasuk dalam pengertian angkutan umum penumpang adalah angkutan kota seperti bus, minibus, taksi, dan pete-pete dan angkutan para transit berupa ojek, becak, delman, bajaj, dan bemor.

Salah satu angkutan umum adalah becak motor yang merupakan kendaraan perpaduan becak sebagai tempat penumpang bekapasitas satu sampai tiga orang dan motor sebagai tempat pengendara. Bemor merupakan kendaraan parasit yang oleh Silkock dalam Warpani (1990), diartikan sebagai bentuk pelayanan angkutan umum penumpang yang berada diantara sistem pelayanan bus konvensional dengan taksi. Lebih lanjut dikemukakan bahwa pengertian para transit di Amerika Utara dan Eropa termasuk pula sistem pul kendaraan (*car-pool*) dan kendaraan panggilan (*dial-a-ride*), sementara di negara sedang berkembang mencakup taksi patungan, becak, bajaj, dan bemor.

Tujuan utama keberadaan angkutan bemor adalah menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. Ukuran pelayanan yang baik adalah pelayanan yang aman, cepat, murah, dan nyaman. Selain itu keberadaan bemor membuka lapangan kerja baru dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya keluarga miskin, yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Surya, 2004).

Sebenarnya definisi tentang bemor ini masih belum jelas karena belum banyak sumber yang membahasnya sehingga dalam menetapkan kriteria kendaraan bemor, hanya didefinisikan berdasarkan bentuk fisik dari angkutan bemor yaitu kendaraan penumpang yang terdiri dari becak dan sepeda motor sebagai tenaga penggerak (Surya, 2004).

G. Pendapatan

Dengan melakukan pekerjaan yang menjadi sumber pendapatan, maka tenaga kerja tersebut tentunya akan memperoleh suatu pendapatan. Untuk menghitung tingkat pendapatan suatu keluarga dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode penerimaan dan metode pengeluaran. Dengan metode penerimaan, pendapatan keluarga diperoleh dengan jalan menjumlahkan semua penerimaan dalam suatu kurung waktu, sedangkan metode pengeluaran, pendapatan rumah tangga diperoleh dengan jalan menjumlahkan semua pengeluaran dalam suatu kurung waktu. Kedua metode ini mempunyai kelemahan, dengan menggunakan metode

penerimaan seringkali menggambarkan suatu gejala *understated*, sedangkan menggunakan metode pengeluaran seringkali *overstated* (Sajogyo, 1986).

Sumber dari pendapatan terletak pada bakat, pengambilan resiko, nasib baik, kejeniusan dan kerja keras (Samuelson, 1989). Sedangkan Kuriawan dalam Herawati (2003), mengemukakan bahwa ada dua faktor yang berhubungan dengan pendapatan seseorang, yaitu :

1. Faktor internal, yang terdiri dari masa kerja dan jam kerja.
2. Faktor eksternal, yang terdiri dari umur, pendidikan dan jenis kelamin.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat ekonomi suatu masyarakat. Semakin tinggi pengeluaran rumah tangga, dapat dikatakan semakin baik pula tingkat ekonomi masyarakat. Tingginya pengeluaran rumah tangga dapat dilihat dari besarnya rata-rata pengeluaran rumah tangga selama suatu kurung waktu tertentu (Sajogyo, 1986).

Besarnya persentase pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan bahan makanan merupakan bagian yang lebih besar dibandingkan konsumsi pengeluaran non makanan selama tingkat pendapatan masih tergolong rendah. Namun sebaliknya semakin besar pendapatan rumah tangga, maka pola konsumsi pengeluaran akan bergeser semakin besar ke arah pengeluaran non makanan. Adanya pergeseran pengeluaran dari makanan ke non makanan merupakan petunjuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (Asang, 2005).

H. Kerangka Pemikiran

Salah satu kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2001 – 2005 adalah Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat lapisan bawah (miskin) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui satuan kerja (Dinas/Kantor) dalam bentuk pemberian bantuan dana pinjaman sebagai modal kerja bagi usaha kecil.

Tujuan, sasaran, dan mekanisme pengelolaan program PEK telah disusun dengan jelas oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) selaku mediator kegiatan, tetapi apakah hal tersebut disusun sesuai dengan kondisi dan harapan masyarakat, apakah pelaksanaannya dilakukan secara tertib dan transparan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan dan hubungan terhadap masyarakat penerima bantuan.

Pengembangan usaha kecil dalam menanggulangi dampak kemiskinan dapat menantang sejumlah teori bahwa kemiskinan tidak dapat dihilangkan di Indonesia, persoalan kemiskinan pasti akan muncul ke permukaan untuk itu perlu upaya penanggulangan secara berkelanjutan dan harus pandai melihat peluang dan kesempatan, jika ada peluang dan

kesempatan yang diberikan kepada keluarga miskin maka persoalan ini akan dapat ditemukan ujung pangkalnya.

Mengembangkan usaha kecil dapat dilakukan dengan memberikan peluang dan kesempatan kerja seluas-luasnya kepada masyarakat khususnya keluarga miskin untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidupnya sehingga akan merangsang pertumbuhan ekonomi lokal, yang menjadi andalan perbaikan ekonomi.

Sasono dalam Raharjo (1999), mengemukakan bahwa keberpihakan pemerintah dalam pengembangan usaha kecil di daerah pedesaan akan mampu menampung tenaga kerja dari masyarakat kecil. Masyarakat kecil yang dimaksud adalah keluarga miskin, kaum duafa yang selama ini kurang tersentuh oleh program pembangunan.

Banyak faktor yang berhubungan terhadap keterlibatan keluarga miskin dalam sektor informal, antara lain umur, tingkat pendidikan, tanggungan dalam keluarga, dan pengalaman dalam berusaha.

Program pengembangan usaha kecil di Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan suatu program yang terpadu dan lintas sektoral yang dimotori oleh Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi UKM dan Investasi, Dinas Transmigrasi dan tenaga kerja, serta Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana. Program ini sudah terlaksana tetapi belum teridentifikasi hubungannya terhadap masyarakat penerima bantuan.

Pemberian bantuan yang berupa penguatan modal melalui program pemberdayaan ekonomi kerakyatan akan memberikan peluang bagi

keluarga miskin untuk mengembangkan usaha guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Masalah pokok yang paling dominan mempunyai hubungan dengan usaha kecil maupun peluang kesempatan kerja adalah masalah permodalan. Jadi dengan memberikan bantuan modal, baik yang berupa bantuan langsung ataupun pinjaman dengan bunga ringan akan berdampak positif bagi peluang kerja, khususnya keluarga miskin yang ada dipedesaan untuk melakukan usaha ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Banyak faktor yang berhubungan dengan penanggulangan keluarga miskin melalui pemberian bantuan modal bagi pengendara bemor guna meningkatkan pendapatan, yaitu umur, pendidikan, Jam kerja, jumlah tanggungan, pengalaman kerja, dan status kepemilikan.

Umur merupakan salah satu indikator untuk mengetahui produktifitas seseorang. Tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas, dimana ia mampu melakukan aktifitas ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usia tenaga kerja ada yang digolongkan dalam usia produktif utama yaitu usia 25 sampai 49 tahun.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator penilaian atas sumber daya manusia. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia, sehingga dengan tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk mengembangkan diri, termasuk dalam

mengelola usaha ekonomi yang mengantarkan kearah perbaikan kondisi ekonomi keluarga.

Jam kerja merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui produktivitas kerja disamping output yang dihasilkan karena jam kerja dapat menunjukkan kemampuan seseorang dalam bekerja. Diasumsikan bahwa semakin banyak jam kerja seseorang maka semakin tinggi produktivitasnya. Berdasarkan *Labor Force Concept*, seseorang dapat digolongkan sebagai pekerja penuh dan setengah pengangguran berdasarkan jam kerjanya. Mereka yang memiliki jam kerja diatas 35 jam seminggu digolongkan sebagai pekerja penuh, sedangkan mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu digolongkan sebagai setengah pengangguran.

Jumlah tanggungan dalam keluarga merupakan suatu beban sebagai suatu akibat tingginya tingkat konsumsi yang harus dipenuhi dan berbeda dengan keluarga yang jumlah tanggungannya kecil. Besarnya jumlah tanggungan keluarga merupakan desakan moril untuk mencari peluang kerja yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

Pengalaman kerja didefinisikan sebagai lamanya seseorang menekuni pekerjaan. Becker (1993), mengemukakan bahwa *human capital* dari pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) yang dimiliki seseorang akan mendorong produktivitas kerja seseorang dan pada gilirannya akan menerima balas jasa berupa upah yang diasumsikan sama dengan produktivitas marjinal seseorang. Pengalaman kerja akan mendorong kearah peningkatan penerimaan pendapatan dimasa datang.

Status kepemilikan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sebagai milik sendiri dan sewa, status kepemilikan ini banyak berhubungan terhadap jam kerja dan pendapatan pengendara bemor.

Dalam konsep pendapatan, orang melakukan apa saja yang dapat memberikan imbalan berupa pendapatan. Sedangkan dalam konsep bisnis, orang membelanjakan sejumlah uang dengan harapan memperoleh pendapatan yang lebih besar.

Keterbatasan modal kerja merupakan kendala utama bagi kegiatan disektor informal. Oleh karena itu, pemberian kredit lunak akan sangat membantu usaha kecil disektor informal seperti pengendara bemor untuk berkembang dan memperoleh pendapatan yang lebih banyak.

Penelitian yang dilakukan Hellerstain dalam Madris (2007), menggunakan data *sensus of popolation US* tentang pekerja menemukan bahwa ada perbedaan upah dan pendapatan (*wage and salaries*) antara pekerja yang berumur 35 – 54 tahun dan yang berumur 55 tahun ke atas terhadap pekerja usia muda 15 – 34 tahun. Nampak bahwa semakin tinggi umur semakin tinggi pendapatan, namun pada umur tua 55 tahun ke atas pendapatan mulai menurun.

Kemudian Walsh dalam Madris (2007), menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan. Ada perbedaan menarik antara tingkat pendidikan dengan pengalaman kerja (kedua variabel *human capital*) dalam penelitian ini. Kalau pengalaman kerja pada awalnya berpengaruh positif dan pada suatu saat tertentu akan

berpengaruh negatif terhadap pendapatan, maka untuk variabel pendidikan tidak demikian halnya dimana tingkat pendidikan selalu berpengaruh positif terhadap pendapatan.

Hasil penelitian yang dilakukan Khaeraty (2004), menunjukkan bahwa pendidikan dan bantuan modal mempunyai hubungan terhadap pendapatan, sedangkan umur, jumlah tanggungan, dan jenis usaha tidak mempunyai hubungan terhadap pendapatan keluarga pra sejahtera dan sejahtera I di Kecamatan Mamajang Kota Makassar.

Penelitian yang dilakukan Jainuddin (2004), menunjukkan bahwa umur, pengalaman kerja dan jumlah tanggungan mempunyai hubungan signifikan dengan pendapatan keluarga miskin dalam melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif di Kota Makassar.

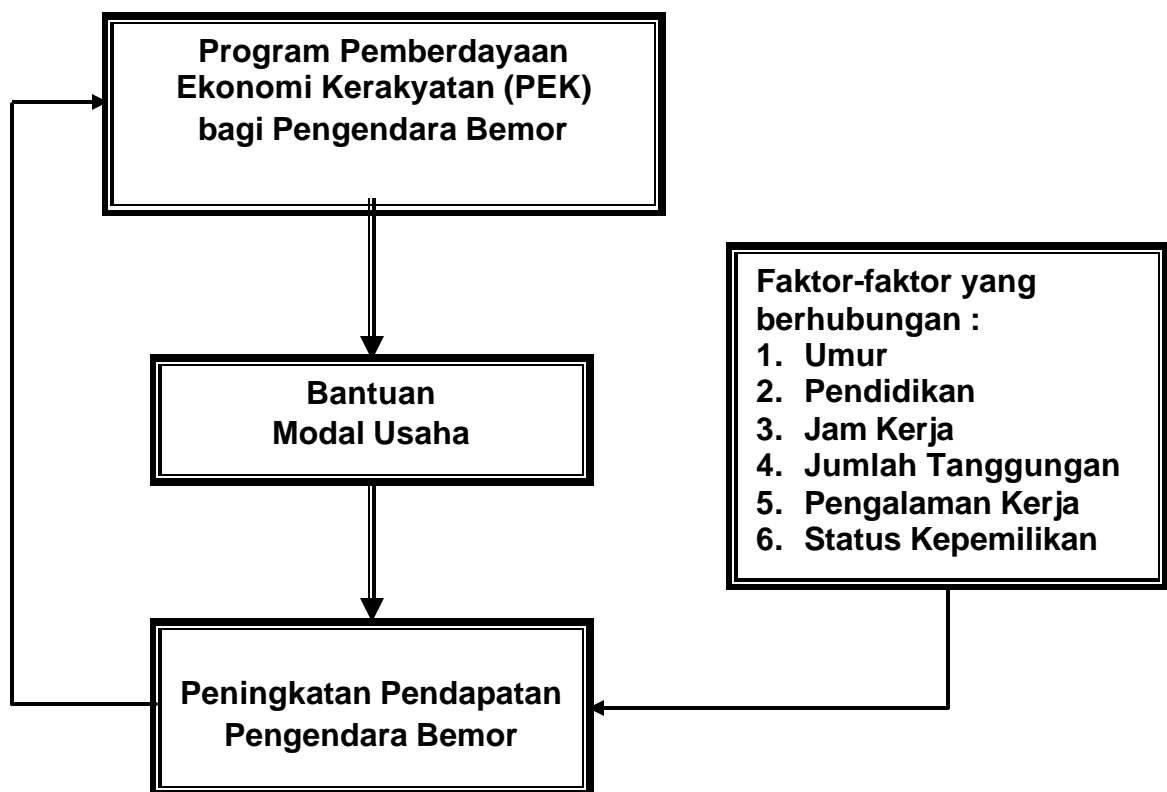
Penelitian yang dilakukan oleh Tahir (2004), menunjukkan bahwa pendidikan, pengalaman kerja, dan modal mempunyai hubungan dengan pendapatan keluarga miskin disektor industri kecil, sedangkan jumlah tanggungan tidak berpengaruh nyata terhadap pendapatan keluarga miskin disektor industri di Kabupaten Barru.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Amin (2001), menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara bantuan modal Kukesra dan KPKU terhadap pendapatan wanita anggota kelompok UPPKS di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berarti untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas, sekaligus juga melahirkan

rekomendasi bagi penyempurnaan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan dimasa yang akan datang. Kerangka pikir penelitian dapat dilihat dalam bentuk skema sebagai berikut :

I. Skema Kerangka Pemikiran



J. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga bantuan modal program pemberdayaan ekonomi kerakyatan memberikan perbedaan terhadap pendapatan pengendara bemor di Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Diduga faktor umur mempunyai hubungan signifikan dengan pendapatan pengendara bemor di Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Diduga faktor pendidikan mempunyai hubungan signifikan dengan pendapatan pengendara bemor di Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Diduga faktor jam kerja mempunyai hubungan signifikan dengan pendapatan pengendara bemor di Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Diduga faktor jumlah tanggungan mempunyai hubungan signifikan dengan pendapatan pengendara bemor di Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Diduga faktor pengalaman kerja mempunyai hubungan signifikan dengan pendapatan pengendara bemor di Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang.
7. Diduga status kepemilikan memberikan perbedaan terhadap pendapatan pengendara bemor di Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang.